

ABSTRAK

**PERANAN A.H. NASUTION DALAM BIDANG MILITER
DAN POLITIK PADA PERISTIWA 17 OKTOBER 1952**

IDA ROSANA

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2004

Tujuan penulisan makalah ini untuk mengetahui tentang peranan A.H. Nasution dalam bidang militer dan politik pada peristiwa 17 Oktober 1952. Dalam makalah ini ada tiga permasalahan pokok yang akan dibahas yaitu pertama bagaimana proses terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952, kedua bagaimana dampak dari peranan A.H. Nasution dalam bidang militer dan politik pada peristiwa 17 Oktober 1952, ketiga bagaimana penyelesaian peristiwa 17 Oktober 1952.

Dengan adanya sistem Demokrasi Parlementer maka kabinet yang ada selalu berganti-ganti. Rakyat merasa kecewa dengan sistem pemerintahan yang seperti itu, dimana kabinet yang ada selalu tidak dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Sehingga pada tanggal peristiwa 17 Oktober 1952 rakyat mengadakan demokrasi untuk menuntut presiden agar membubarkan parlemen dan segera diadakan pemilu.

Sebagai dampak dari peristiwa tersebut maka A.H. Nasution pada tanggal peristiwa 5 Desember 1952 dibebastugaskan sebagai KSAD. Namun demikian pada tanggal 27 Oktober 1955, Kabinet Burhanuddin mengangkat kembali sebagai KSAD menggantikan Bambang Oetoyo.

Dalam peristiwa 17 Oktober 1952, A.H. Nasution mempunyai peranan yang penting dalam percaturan politik Indonesia sebagai anggota Dewan Nasional ia mengusulkan bahwa militer sebagai kekuatan sosial politik bahkan telah melontarkan ide kembali ke UUD 1945. Sehingga dengan demikian A.H. Nasution telah berhasil meletakkan legitimasi konstitusional bagi keterlibatan militer dalam kehidupan politik serta menempatkan posisi dan fungsi politik golongan tentara dan dengan demikian militer, akan menjadi kekuatan politik.

ABSTRACT

**NASUTION'S ROLE IN MILITARY AND POLITICS SECTOR
ON THE INCIDENT OF OCTOBER, 1952**

IDA ROSANA

**SANATA DHARMA UNIVERSITY
YOGYAKARTA
2004**

The writing purpose of this paper was to find out the role of A.H. Nasution in the military and political sector on the incident of October 17, 1952. In this paper, there was three main problems which would be discussed, namely the first was how the process on the incident was, the second was how the impact of his role in the military and political sector on it was, and the last was how its solution was.

With the existence of parliamentary democratic system so the existing cabinet always be in turn. People felt disappointment with such government's system, where the existing cabinet was not always be able to do its duty well. So that on the October 17, 1952, people took the democracy to prosecute the president in order to dismiss the parliamentary and hold the election as soon as possible. As the consequence of the incident, A.H. Nasution was freed in duty as KSAD on December 5, 1952. However, on October 27, 1955, the Cabinet of Burhanuddin re-inaugurated him as KSAD replacing Bambang Oetoyo.

On the incident of October 17, 1952, A.H. Nasution had the important role in the political affair of Indonesia as the member of National Board. He proposed that even the military as the social-politics force had given the idea back on the 1945 Constitution (UUD 1945). He had been successful to put the constitutional legitimacy on the military involvement in the political life, the position and the political function of military class and thus the military would be the political force.